

Tata Kelola Pemanfaatan Sosial Properti Rampasan untuk Layanan Publik Berkelanjutan

Egar Ryan Pratama*, Naitrujur Boymau, Dircia Lemos Alves
Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, Indonesia

Informasi Artikel	ABSTRAK
<p>Article history:</p> <p>Received Oktober 20, 2026 Revised Oktober 26, 2026 Accepted Oktober 28, 2026</p> <hr/> <p>Kata Kunci:</p> <p>Properti Rampasan, Pemanfaatan Sosial, Manajemen Aset Publik, Keberlanjutan Layanan, Nilai Publik</p> <hr/> <p>Keywords:</p> <p><i>Confiscated Real Estate, Social Reuse, Public Asset Management, Service Sustainability, Public Value</i></p>	<p>Pemanfaatan tanah dan bangunan rampasan bagi masyarakat memerlukan kejelasan pengelolaan dan dukungan operasional. Pengalokasian aset perlu diikuti kesiapan kegiatan dan penyediaan manfaat bagi masyarakat. Penelitian mengkaji tata kelola, kendala keberlanjutan, dan nilai publik melalui tinjauan pustaka terstruktur terhadap 36 publikasi hasil penelusuran Elicit dan OpenAlex. Analisis naratif memperhatikan tahap pemanfaatan, bentuk capaian, serta keterkaitan proyek antarpublikasi. Sebanyak 35 publikasi membahas Italia dan satu membahas perencanaan di Indonesia, dengan 32 kelompok penelitian. Temuan menunjukkan persoalan pembagian tanggung jawab, kondisi fisik, biaya rehabilitasi, akses kredit, dan dukungan operasional. Studi organisasi mencatat layanan, pekerjaan, dan partisipasi, sedangkan analisis kuantitatif menggunakan indikator pasar perumahan serta persaingan elektoral. Setiap ukuran menjelaskan capaian menurut satuan pengamatan dan rancangan penelitiannya. Pengelolaan perlu menyelaraskan kesiapan properti dengan rencana kegiatan serta membedakan alokasi, pelaksanaan, layanan, dan manfaat bagi penerimanya. Hasil dibaca sesuai cakupan penelusuran, akses teks sumber, dan irisan data antarpublikasi. Biaya operasi perlu dianggarkan tersendiri dari biaya rehabilitasi.</p> <hr/> <p>ABSTRACT</p> <p><i>Social reuse puts confiscated land and buildings to community use. Allocation needs follow-through in activities and services for intended users. This article examines governance, sustainability constraints, and public value through a structured literature review of 36 accessible scholarly reports identified through Elicit and OpenAlex. Narrative synthesis distinguishes implementation stages, evidence types, and shared projects. The corpus comprises 35 reports concerning Italy and one Indonesian planning report, representing 32 study groupings. Findings describe handover responsibilities, property condition, rehabilitation finance, credit access, and operating resources. Organizational studies document services, employment, and participation, while quantitative analyses examine housing-market and electoral-competition proxies. Each design explains outcomes according to its unit of observation and analytical approach. Management should assess property readiness alongside operating plans and distinguish allocation, activities, service outputs, and beneficiary outcomes. Findings are interpreted in relation to search coverage, full-text availability, and shared publication data. Operating costs require provision alongside funding for rehabilitation.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>This is an open access article under the CC BY license</i></p> <div style="text-align: right;">  </div>

Corresponding Author:

Egar Ryan Pratama
Politeknik Keuangan Negara STAN,
Tangerang Selatan, Indonesia
Email: egar_4111230124@pknstan.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pemanfaatan properti rampasan untuk pelayanan masyarakat memerlukan kesiapan aset dan kemampuan pihak yang mengelolanya. Setelah menerima aset, pemerintah daerah maupun organisasi sosial masih dapat menghadapi kerusakan bangunan, biaya pemeliharaan, ketidakjelasan penguasaan fisik, dan keterbatasan dana kegiatan. Esposito dan Ricci menjelaskan bahwa kewajiban yang melekat pada aset tersebut dapat melampaui kemampuan penerimanya [1, hlm. 229–230].

Dalam penelitian ini, pemanfaatan sosial merujuk pada penggunaan langsung tanah atau bangunan untuk kepentingan masyarakat maupun penyelenggaraan pelayanan publik. Penjualan aset untuk membiayai program sosial merupakan bentuk penggunaan hasil perampasan yang berbeda. Pada penggunaan langsung, pengelola tetap harus menentukan kelayakan lokasi, kondisi bangunan, pihak penerima, dan cara menjalankan kegiatan. Penelitian tentang koperasi membahas persoalan tersebut melalui akses lahan, pembentukan usaha, dan jaringan pendukungnya [2], sedangkan kajian bangunan menekankan penilaian teknis serta penyesuaian ruang dengan fungsi yang direncanakan [3].

Penilaian manfaat pengelolaan aset mencakup efisiensi organisasi dan capaian bagi masyarakat. Bryson dkk. menempatkan tujuan bersama dan legitimasi pengambilan keputusan sebagai bagian dari penilaian kinerja publik [4]. Pemikiran ini menjadi dasar pembahasan tata kelola, keberlanjutan, dan nilai publik dalam artikel ini. Tata kelola berkaitan dengan kewenangan, keterlibatan para pihak, dan pertanggungjawaban. Keberlanjutan menyangkut kecukupan sumber daya serta kemampuan mempertahankan kegiatan, sementara nilai publik dilihat dari layanan, akses, dan perubahan yang dialami masyarakat. Pembahasan menggunakan ketiga aspek tersebut dengan memperhatikan fokus masing-masing publikasi.

Sebagian besar publikasi yang dikaji membahas pengalaman Italia. Pengelolaan aset sitaan dan rampasan yang berkaitan dengan kejahatan terorganisasi di negara ini melibatkan ANBSC, lembaga nasional yang menangani administrasi serta penetapan peruntukan aset bersama otoritas peradilan dan pemerintah daerah [5].

Pada tingkat Uni Eropa, Pasal 19 Directive (EU) 2024/1260 mendorong kemungkinan penggunaan properti rampasan untuk kepentingan publik atau sosial [6]. Ketentuan tersebut memberikan arah kebijakan pemanfaatan. Pelaksanaannya tetap perlu diteliti untuk mengetahui apakah penetapan peruntukan aset diikuti penyelenggaraan layanan.

Penelitian yang telah terbit membahas pemanfaatan properti rampasan dari sudut yang beragam. Survei pengelola menguraikan kendala rehabilitasi dan pembiayaan [7]. Kajian atas inisiatif yang gagal menunjukkan lemahnya keterlibatan masyarakat setempat dan kegiatan yang tidak terlaksana meskipun membawa identitas antimagia [8]. Penelitian harga properti serta persaingan elektoral mengukur perubahan di luar organisasi pengelola [9], [10], sedangkan penelitian perencanaan membahas penggunaan yang masih diusulkan. Perbedaan ini menuntut pemisahan antara rencana, kegiatan yang sudah berjalan, keluaran, dan hasil ketika menilai keberhasilan pemanfaatan.

Artikel ini membandingkan temuan pada setiap tahap pemanfaatan dengan memperhatikan kemungkinan beberapa publikasi berasal dari proyek atau organisasi yang sama. Pembahasan diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian. RQ1 membahas cara properti rampasan dialokasikan dan dikelola untuk penggunaan sosial atau publik secara langsung. RQ2 menelaah kondisi kelembagaan, keuangan, fisik, dan operasional yang dilaporkan mendukung atau menghambat keberlanjutan. RQ3

membahas cara nilai publik dinilai dan hasil yang benar-benar diukur. Cakupan pembahasan mengikuti publikasi yang berhasil dihimpun dan dianalisis dalam kajian ini.

2. METODE

2.1 Desain dan cakupan kajian

Penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka terstruktur terhadap 36 publikasi ilmiah yang tersedia dan telah diperiksa berdasarkan teks sumbernya. Temuan dibahas secara naratif dengan mempertimbangkan hubungan antarpublikasi dan kelompok penelitian asalnya. Keterkaitan data antarpublikasi menjadi pertimbangan dalam menata kelompok penelitian dan membaca temuannya. PRISMA 2020 dan PRISMA-S digunakan sebagai acuan pelaporan sumber, kriteria, keputusan seleksi, dan dokumentasi penelusuran [11], [12]. Protokol disusun kembali secara retrospektif, tanpa registrasi awal. Sintesis mencakup publikasi yang telah ditetapkan untuk dianalisis, sementara penilaian kelayakan atas calon publikasi lainnya masih berlangsung.

Publikasi disertakan apabila membahas tanah atau bangunan hasil perampasan yang berkaitan dengan kejahatan, menelaah pengelolaan setelah perampasan, membahas penggunaan sosial atau publik secara langsung, dan menyajikan analisis empiris asli. Perampasan melalui mekanisme perdata atau preventif yang berkaitan dengan kejahatan tetap dapat memenuhi kriteria tanpa harus didahului pemidanaan terhadap orang. Penelitian mengenai perusahaan rampasan digunakan hanya jika temuan tentang tanah atau bangunannya dapat dipisahkan. Pembahasan yang terbatas pada penjualan atau pembagian uang, bangunan terbengkalai tanpa asal perampasan yang jelas, serta komentar tanpa data empiris dikeluarkan dari bahan kajian utama.

Analisis empiris yang diterima mencakup penelitian lapangan, survei, kajian data administrasi dan dokumen, ekonometrika, serta perencanaan berdasarkan penilaian yang dilakukan peneliti atas lokasi tertentu. Proyek yang belum beroperasi dapat disertakan sebagai kajian perencanaan, tetapi manfaat yang diperkirakan dicatat terpisah dari hasil yang sudah diamati. Jenis publikasinya meliputi artikel jurnal, bab buku, dan makalah konferensi akademik. Literatur kelabu atau grey literature digunakan sebagai bahan pendukung di luar 36 publikasi utama. Ketentuan mengenai jenis publikasi dipertegas saat pemeriksaan sumber berlangsung.

Batas waktu ditentukan berdasarkan tanggal publikasi pertama kali tersedia, paling lambat 23 Oktober 2026, tanpa batas tahun awal. Oleh karena itu, bab buku Parrotta dkk. yang mencantumkan tahun terbit 2027 tetap memenuhi kriteria karena telah tersedia secara daring pada 10 Oktober 2026 [7].

2.2 Sumber penelusuran dan pengelolaan data bibliografis

Penelusuran menggunakan berkas hasil pencarian Elicit dan OpenAlex yang tersimpan dalam bahan penelitian. Berkas pengumpulan Elicit memuat 1.086 kemunculan hasil pencarian, sedangkan berkas penyaringan abstraknya memuat 1.067 ID publikasi. Setelah lima duplikat DOI dihapus, diperoleh 1.062 entri Elicit. Dari 59 baris OpenAlex, terdapat 22 baris yang cocok dengan 21 entri Elicit, termasuk satu pasangan duplikat di dalam hasil OpenAlex. Sebanyak 37 entri lainnya menjadi tambahan sehingga jumlah gabungan mencapai 1.099 entri. Pencocokan dilakukan dengan menyeragamkan penulisan judul serta memeriksa penulis, media penerbitan, dan pengenalan bibliografis.

Dokumentasi Elicit memuat satu pertanyaan dalam bahasa alami dan dua kueri Boolean. Pencarian OpenAlex menggunakan judul, abstrak, dan kata kunci. Dokumentasi penelitian menyimpan seluruh kueri, dengan tanggal pencarian awal yang tidak tercatat secara pasti. Tanggal 22 Oktober 2026 menandai versi laporan Elicit. Saat kueri OpenAlex dijalankan kembali pada 24 Oktober 2026 tanpa mengubah data, diperoleh 59 judul yang sesuai dengan berkas ekspor. Hasil pengulangan digunakan untuk mencocokkan daftar publikasi, dengan mempertimbangkan perubahan indeks dari waktu ke waktu. Cakupan penelusuran berasal dari kedua layanan tersebut, tanpa pencarian tambahan melalui basis data bibliografi atau literatur hukum lain.

2.3 Seleksi publikasi dan pemeriksaan teks sumber

Pada seleksi awal, 140 publikasi diteruskan untuk pencarian teks lengkap, sedangkan 959 entri dikeluarkan berdasarkan judul atau abstraknya. Dari 140 publikasi tersebut, 38 tercatat dengan status teks lengkap tidak diperoleh. Pemeriksaan dan pencocokan kembali terhadap 102 penilaian menghasilkan 36 publikasi utama, 60 publikasi yang dikeluarkan, dan enam sumber pendukung. Salah satu keputusan eksklusi menggunakan isi utama yang masih terbaca pada PDF dengan bagian akhir daftar pustaka terpotong. Kondisi berkas dicatat tersendiri dalam lembar pemeriksaan.

Pemeriksaan konsistensi seleksi pada 25 Oktober 2026 mencakup penelaahan kembali 1.099 judul beserta isi kolom abstrak yang tersedia. Sebanyak 1.078 kolom berisi teks dan 21 kolom tidak berisi abstrak; sebagian teks merupakan metadata atau abstrak yang terpotong. Penilaian menghasilkan 38 Lanjut, 261 Ragu, dan 800 Eksklusi. Perbandingannya dengan keputusan seleksi awal disajikan pada Tabel 1. Sebanyak 190 entri yang sebelumnya dikeluarkan dibuka kembali dengan status Ragu untuk penilaian kelayakan lebih lanjut sebelum dapat dimasukkan ke dalam bahan kajian utama. Daftar ini dicatat terpisah dari 38 publikasi dengan status teks lengkap tidak diperoleh.

Tabel 1 Perbandingan keputusan seleksi awal dan pemeriksaan lanjutan

Keputusan seleksi awal	Lanjut	Ragu	Eksklusi	Jumlah
Dikeluarkan pada tahap judul atau abstrak	0	190	769	959
Diteruskan untuk pencarian teks lengkap	38	71	31	140
Jumlah	38	261	800	1.099

Pemeriksaan lanjutan merupakan telaah tambahan atas hasil seleksi awal dan dicatat terpisah dari proses penetapan 36 publikasi utama. Pada tahap abstrak, 25 publikasi utama mendapat keputusan Lanjut dan 11 mendapat keputusan Ragu. Hasil pada publikasi utama dibaca bersama pemeriksaan teks lengkapnya. Klasifikasi judul dan abstrak pada pemeriksaan lanjutan dihasilkan menggunakan perangkat AI OpenAI Codex. Elicit dan perangkat tersebut juga digunakan untuk penyaringan, ekstraksi data, pencocokan hasil, penelusuran sumber, serta penyiapan naskah. Informasi dari pengerjaan proyek sebelumnya turut digunakan dalam pemeriksaan, tanpa penelaah manusia kedua yang bekerja secara independen atau penghitungan kesepakatan antarpemilai. Dokumentasi penggunaan sebelumnya memuat nama produk, sedangkan identitas dan versi model tidak tercatat.

2.4 Pencatatan data dan sintesis temuan

Lembar ekstraksi data mencatat identitas dan versi publikasi, jenis terbitan, negara, desain penelitian, unit analisis, tahap pelaksanaan, temuan untuk setiap pertanyaan penelitian, keterbatasan, serta halaman sumber. Nomor halaman mengikuti dokumen yang benar-benar diperiksa. Halaman tercetak digunakan jika dapat dicocokkan, sedangkan naskah yang telah diterima atau accepted manuscript, preproof, dan PDF mandiri tetap menggunakan penomoran pada versi tersebut. Penilaian kualitatif mencakup asal data, pemilihan kasus, kejelasan analisis, kesesuaian dengan penggunaan langsung, dan kemampuan desain menjelaskan hubungan sebab-akibat. Catatan penilaian mengikuti rancangan setiap studi, tanpa penggunaan instrumen baku risiko bias maupun skor mutu numerik.

Temuan dikelompokkan menurut RQ1, RQ2, dan RQ3, kemudian dibandingkan berdasarkan tahap pemanfaatan dan jenis kesimpulan yang dapat didukung. Publikasi dari proyek yang sama dihubungkan dalam kelompok penelitian asalnya. Sebagai analisis pembanding, kajian juga menelaah kembali 22 publikasi dalam 20 kelompok penelitian setelah menyisihkan 14 publikasi yang berfokus pada desain atau memiliki pelaporan terbatas. Pemilihan tersebut dilakukan setelah penelusuran sebagai

analisis pembandingan yang bersifat retrospektif. Perbedaan desain, populasi, satuan pengamatan, dan hasil yang diukur menjadi dasar penggunaan sintesis naratif, tanpa meta-analisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik publikasi dan keterkaitan penelitian

Bahan kajian terdiri atas 25 publikasi jurnal, lima bab buku, dan enam makalah konferensi akademik. Sebanyak 35 publikasi membahas Italia, sedangkan satu publikasi membahas rencana penggunaan aset untuk kepentingan institusi di Indonesia. Komposisi tersebut menempatkan pengalaman Italia sebagai pusat pembahasan, disertai satu laporan perencanaan dari Indonesia.

Satuan yang diteliti juga beragam, meliputi properti, pemerintah daerah, organisasi, peserta kegiatan, harga penawaran, dan hasil pemilihan. Setiap jumlah dibaca menurut satuan pengamatan sumbernya. Sebagai contoh, survei terhadap 106 koperasi menggunakan organisasi sebagai satuan analisis, sehingga angka 106 dicatat sebagai jumlah koperasi [7, hlm. 202].

Beberapa publikasi berasal dari proyek yang sama. Setelah hubungan tersebut diperhitungkan, 36 publikasi dapat dikelompokkan menjadi 32 kelompok penelitian sebagaimana disajikan pada Tabel 2. CO-WIN menghasilkan kajian tentang kerja sama pelaksanaan, survei pemerintah daerah, dan penilaian teknis [13], [14], [15]. Dua publikasi SHArch membahas desain bekas kilang rampasan di Villa Literno [16], [17], sedangkan dua publikasi Lombardy berasal dari program penelitian Eupolis-CROSS [18], [19]. Perbedaan metode di dalam satu proyek memperluas informasi yang diperoleh, dengan keterkaitan sumber data yang diperhatikan dalam sintesis.

Tabel 2 Publikasi yang berasal dari proyek penelitian yang sama

Kelompok proyek	Jumlah publikasi	Kelompok penelitian	Dasar pengelompokan
CO-WIN	3	1	Program rehabilitasi dan pelatihan yang sama
SHArch	2	1	Penelitian desain pada properti Villa Literno
Eupolis-CROSS Lombardy	2	1	Program pemetaan dan interpretasi Lombardy
Publikasi lainnya	29	29	Keterkaitan data antarpublikasi memerlukan penelusuran lebih lanjut
Jumlah	36	32	Pengelompokan memperhatikan kemungkinan irisan data antarpublikasi

Publikasi tentang Libera Terra juga memerlukan pembacaan silang atas organisasi dan data yang digunakan. Bucolo meneliti empat koperasi melalui pengamatan dan keterangan dari kelompok pihak yang berbeda [20, hlm. 82]. Picciotto melakukan dua wawancara informan kunci dan kunjungan kebun, sekaligus menggunakan kutipan dari penelitian sebelumnya [2, hlm. 549–551]. Dalam penelitian Picciotti, tiga wawancara pada lembaga Libera Terra merupakan bagian dari rancangan tiga kasus yang mencakup 12 wawancara [21, versi early view hlm. 7–8]. Temuan tentang properti rampasan dibaca dari bagian penelitian yang sesuai. Kesamaan organisasi dan penggunaan sumber terdahulu diperhatikan ketika membandingkan bukti antarpublikasi. Kelompok penelitian digunakan untuk menata hubungan tersebut, dengan kemungkinan irisan data yang masih memerlukan penelusuran lebih lanjut.

3.2 Tata kelola pengalokasian dan pemanfaatan

Pengalokasian aset melibatkan perpindahan kewenangan, penguasaan, dan kewajiban antarlembaga. Esposito dan Ricci mencatat bahwa hak pihak ketiga serta kewajiban perbaikan fisik dapat menghambat pemanfaatan aset yang telah ditetapkan peruntukannya [1, hlm. 229–230]. Dalam survei Parrotta dkk., pengelola juga melaporkan prosedur yang terpecah antarpihak dan keterlambatan perizinan [7, hlm. 205–211]. Kedua penelitian menempatkan koordinasi antarlembaga sebagai persoalan pelaksanaan, bersama kondisi hukum dan kesiapan properti pada kasus yang diteliti.

Bonzanni membandingkan jenis aset dan status pengalokasiannya melalui data ANBSC [22, PDF mandiri hlm. 5–6]. Informasi tersebut menjelaskan kondisi administratif aset. Usulan fungsi baru dalam publikasi yang sama ditempatkan pada tahap perencanaan pemanfaatan.

Kerja sama antarpihak terlihat dalam pelaksanaan CO-WIN yang melibatkan pemerintah daerah, universitas, penyelenggara pelatihan, perusahaan, dan organisasi sektor ketiga. Pekerjaan rehabilitasi dipadukan dengan pelatihan serta bantuan material sehingga partisipasi dapat dimulai selama konstruksi berlangsung [13, hlm. 240–247]. Pada Ex Limonetti, dua koperasi didukung pemerintah, universitas, dan organisasi sosial [23, hlm. 35–37]. Sementara itu, WelfareLab melibatkan otoritas metropolitan, Macramè, universitas, dan yayasan [24, hlm. 227–228]. Ketiga kasus memperlihatkan kemitraan melalui pembagian peran dan sumber daya menurut kebutuhan proyek.

Dalam kasus yang diteliti Picciotto, konsorsium delapan pemerintah daerah, prefektur, Libera, dan organisasi pendukung berperan dalam penggabungan lahan, perekrutan, pelatihan, serta perintisan usaha koperasi [2, hlm. 550–552]. Jaringan tersebut menunjukkan cara pengelola menghadapi lahan yang terpisah-pisah dan keterbatasan pada awal kegiatan. Namun, Bucolo juga menemukan ketimpangan keterwakilan dalam negosiasi serta risiko berkurangnya keterlibatan pemerintah setelah tanggung jawab diserahkan kepada organisasi sosial [20, hlm. 88–91]. Kesamaan tujuan para pihak karena itu tetap perlu disertai kejelasan kewenangan pengambilan keputusan dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Aspek lain yang diteliti adalah keterbukaan informasi. Bisogno dkk. menggunakan data pemantauan oleh masyarakat atas 1.076 pemerintah daerah pada 2021 dan 1.073 pada 2022, dengan 366 pemerintah daerah dalam analisis model. Keterbukaan meningkat setelah pengajuan permintaan informasi dan dalam model berkaitan dengan infrastruktur pelayanan serta konsentrasi kekuasaan politik [25, accepted manuscript hlm. 7, 10–12]. Sebagai hasil analisis observasional, hubungan tersebut ditafsirkan bersama faktor lain yang ditelaah dalam model. Modica memperlihatkan perlunya mencatat alokasi dan penggunaan nyata secara terpisah di Palermo, termasuk ketika informasi tidak tersedia, aset tidak digunakan, atau terdapat masalah penguasaan fisik [26, hlm. 240–244]. Data keterbukaan informasi dan data pengoperasian fasilitas menjelaskan tahap pengelolaan yang berbeda.

Penggunaan aset untuk kepentingan publik juga tidak terlepas dari persaingan politik. Melalui dokumen dan 12 wawancara, Corica dan Mete menguraikan peran koalisi masyarakat serta lembaga publik dalam mempertahankan pemanfaatan Suvignano. Para pihak juga memperebutkan pengakuan atas peran politiknya [27, hlm. 1510–1518]. Kajian C. Palermo di Bari dan Lecco, yang didasarkan pada 58 wawancara formal dan informal, menekankan kemampuan administrasi, pemahaman prosedur, serta perdebatan mengenai fungsi properti [28, hlm. 80–86].

Troisi dkk. membahas pengelolaan jaringan melalui telaah dokumen dan wawancara dengan sepuluh pimpinan Libera. Telaah dokumen dan wawancara tersebut memberikan penjelasan kualitatif mengenai praktik organisasi [29, hlm. 143–150].

Penghentian dan kegagalan inisiatif turut menjelaskan persoalan pengelolaan aset. Phillips menelaah dua inisiatif di Calabria melalui dokumen publik dan peradilan. Anti-Mafia University yang direncanakan di Limbadi tidak menerima mahasiswa, dan properti yang terkait dikembalikan kepada pemerintah daerah [8, hlm. 113–119]. Temuan ini menunjukkan bahwa identitas antimafia belum cukup untuk menjamin legitimasi dan berjalannya kegiatan. Penerima aset dengan bentuk berbeda dibahas

Guzzo dalam kasus konsesi tanah untuk kompleks paroki di Gioia Tauro. Penjelasan mengenai maknanya bagi masyarakat terutama bersumber dari dokumen dan pandangan pihak kelembagaan [30, hlm. 97–100].

Di Indonesia, Hakim dkk. membahas enam bidang tanah di Magelang yang belum berhasil dilelang. Penelitian tersebut menguraikan koordinasi kejaksaan, otoritas keuangan, dan administrasi pertanahan, disertai rekomendasi penggunaan tanah untuk arsip serta gudang barang bukti [31, hlm. 1330–1333]. Penjelasan lebih rinci mengenai kasus ini memerlukan pelengkapan jumlah dan waktu wawancara, identitas aset, serta rujukannya. Temuan ditempatkan sebagai usulan pemanfaatan bagi kebutuhan institusi. Pengoperasian gudang dan pengaturan perubahan status aset secara nasional merupakan pertanyaan tersendiri dari usulan yang dilaporkan.

Sebagai bahan pendukung, laporan RESTART di Rumania mencatat proses penyerahan aset bagi rencana taman kanak-kanak dengan rehabilitasi yang diharapkan pada 2026. Tahap pembukaan layanan masih memerlukan konfirmasi [32, hlm. 7–11]. Naskah kerja mengenai insentif politik di Sisilia juga ditempatkan di luar publikasi utama. Penelitian tersebut mengukur keputusan penetapan peruntukan aset dengan asumsi analisis sebab-akibat yang perlu dinilai sesuai desainnya [33].

3.3 Kendala dalam mempertahankan pemanfaatan

Keberlanjutan penggunaan aset berkaitan dengan kesiapan bangunan dan kemampuan membiayai kegiatan. Pengelola yang disurvei Parrotta dkk. melaporkan kendala rehabilitasi, pemeliharaan, ketidakstabilan pendanaan, keterlambatan pembayaran publik, akses kredit, dan jangka waktu konsesi [7, hlm. 204, 206–212]. Temuan merekam pengalaman responden dalam mempertahankan kegiatan. Persentase dengan jumlah dasar perhitungan yang tidak terinci dipertahankan dalam bentuk pelaporan sumbernya.

Ketersediaan lahan perlu disertai modal untuk mengusahakannya. Dalam kasus Placido Rizzotto, Esposito dan Ricci mencatat 384 acre tanah pinjam pakai yang dikelola dengan keterbatasan peralatan dan dana, termasuk kendala menjadikan tanah sebagai agunan [34, hlm. 297–298]. Picciotto menjelaskan dukungan dana koperasi, Coopfond, serta pinjaman Banca Etica dengan jaminan konsorsium pemerintah daerah [2, hlm. 551, 553–554]. Susunan pembiayaan tersebut menjelaskan cara pengelola mengatasi kendala modal pada kasus yang diteliti.

Setelah rehabilitasi selesai, pengelola masih harus menyediakan biaya pegawai, utilitas bangunan, pemeliharaan, dan kegiatan. Melalui 30 wawancara, pengamatan, serta telaah dokumen, Caggiano dan De Rosa menjelaskan dukungan jaringan dan pengaturan layanan kesehatan, tetapi juga mencatat ketidakpastian pembayaran serta pendapatan pasar [35, hlm. 543–546].

Penelitian di Lombardy memperlihatkan perpaduan pembiayaan rehabilitasi, tarif layanan, dan akreditasi [18, hlm. 35–42]. Kajian terkait juga menunjukkan bahwa kontrak publik dapat membantu mempertahankan kegiatan, sekaligus membatasi kemandirian usaha [19, hlm. 22–23]. Oleh sebab itu, kecukupan dana untuk rehabilitasi perlu dinilai terpisah dari kemampuan membiayai pengoperasian aset.

Pada pemanfaatan lahan untuk usaha produktif, persoalan berikutnya adalah akses pasar. Bucolo menjelaskan tuntutan agar identitas usaha yang menjunjung legalitas tetap disertai produk yang mampu bersaing [20, hlm. 86–90]. Picciotti menguraikan peran perjanjian pengolahan pangan, jaringan ritel, persyaratan mutu, dan perencanaan pemasaran bersama Libera Terra [21, versi early view hlm. 12–14]. Jaringan tersebut menjelaskan dukungan pemasaran dan penjaminan mutu bagi usaha koperasi. Keuntungan dan kelangsungan setiap lokasi menjadi satuan penilaian tersendiri, terutama ketika satu pengelola menangani beberapa bidang tanah maupun layanan.

Survei CO-WIN memperoleh jawaban lengkap dari 44 di antara 49 pemerintah daerah yang dihubungi. Hasilnya menunjukkan kesenjangan antara hibah rehabilitasi dan kebutuhan pengelolaan serta pemeliharaan pada tahap berikutnya [14, hlm. 8–9, 21]. Kajian teknis dari proyek yang sama

membandingkan kebutuhan pelatihan, biaya, serta kriteria penggunaan kembali komponen partisi. Penelitiannya menyatakan perlunya analisis daur hidup secara kuantitatif sebelum dampak lingkungan dapat ditentukan [15, hlm. 1306–1309]. Bersama publikasi proyek lainnya, kedua sumber ini membentuk tiga kajian yang saling melengkapi tentang proyek CO-WIN yang sama.

Penghentian kegiatan juga menjadi bagian dari penilaian keberlanjutan. Menurut Martone, dari 126 proyek Campania yang dipetakan, hampir sembilan dari sepuluh membutuhkan pekerjaan infrastruktur atau rehabilitasi. Uraianya mengenai Nuvoletta Per Salvatore mencatat pengembalian dua bidang tanah kepada pemerintah daerah pada Januari 2022 [36, hlm. 319–321].

Dari sisi teknis, penelitian SHArch dan penilaian terhadap 20 bangunan di Palermo mengembangkan usulan penyesuaian ruang, kenyamanan, energi, serta aksesibilitas [16], [17, hlm. 81–86], [3, hlm. 144–149]. Usulan tersebut menjelaskan kebutuhan desain. Penilaian penghematan energi dan penurunan emisi memerlukan pengamatan setelah bangunan digunakan.

3.4 Penilaian nilai publik

Nilai publik dalam publikasi yang dikaji terlihat pada penyediaan layanan dan pekerjaan, partisipasi, serta perubahan di wilayah sekitar. Data alokasi menjelaskan keputusan administrasi, sedangkan data layanan dan pekerjaan mencatat capaian pada waktu tertentu. Penilaian kesejahteraan mengikuti penerima manfaat dan jangka waktu pengamatan. Tabel 3 merangkum bentuk capaian dan dasar penafsirannya menurut rancangan penelitian.

Tabel 3 Bentuk capaian dan dasar penafsiran temuan

Bentuk capaian	Contoh ukuran	Dasar penafsiran
Sumber daya awal dan kesiapan	Dana, kondisi fisik, penguasaan	Menjelaskan kesiapan awal aset dan pengelola
Kegiatan	Rehabilitasi, pelatihan, budi daya	Menunjukkan kegiatan yang tercatat telah berlangsung
Keluaran administrasi atau layanan	Alokasi, fasilitas dibuka, layanan dan partisipasi	Menjelaskan capaian yang tercatat; penilaian sebab-akibat mengikuti rancangan evaluasi
Hasil pada organisasi atau penerima manfaat	Pekerjaan, keterampilan, akses layanan, kesejahteraan	Penilaian mengikuti pihak yang diamati, waktu pengamatan, dan pembandingan sesuai klaim
Perubahan pada wilayah sekitar	Harga properti dan persaingan elektoral	Hubungan statistik dan penjelasan sebab-akibat dinilai sesuai desain penelitian

Sejumlah publikasi mencatat kegiatan dan keluaran sosial yang telah berlangsung. Esposito dan Ricci melaporkan 11 anggota koperasi dan 23 pekerja musiman, termasuk anggota dari kelompok kurang beruntung [34, hlm. 297–298]. Maestri mencatat delapan pegawai tetap di Arcobaleno serta kegiatan dukungan disabilitas dan sekolah di Il Balzo [18, hlm. 35–42]. De Boni dkk. menguraikan pemulihan sekitar 26 hektare oleh Semi di Vita dan sekitar 20 peserta per tahun dalam program reintegrasi Altereco [37, hlm. 73–74, 80–81]. Angka-angka tersebut mencatat keanggotaan, pekerjaan, dan keikutsertaan program pada periode yang dilaporkan. Penilaian perubahan pada penerima manfaat memerlukan pengamatan lanjutan dengan pembandingan yang sesuai.

Bukti partisipasi juga ditemukan dalam kegiatan pendidikan dan kebudayaan. Corazza dan Zanchettin mengamati tiga lokasi, mewawancarai 60 relawan serta 11 orang dewasa, dan kemudian mengembangkan bahan ajar [38, hlm. 21–25, 31–32]. L. Palermo mencatat 12 lokakarya seni jalanan dengan sekitar 50 peserta pada setiap kegiatan. Pencatatan per kegiatan perlu dibedakan dari hitungan 600 peserta unik. Evaluasi dampak lebih lanjut memerlukan dukungan dana yang menurut penulis masih

terbatas [39, hlm. 218–219]. McGinley mendokumentasikan pelaksanaan lokakarya sekolah dan pertunjukan di gudang rampasan Palermo melalui tulisan praktik singkat [40, hlm. 1–3].

Pada lingkup wilayah, Muti menghubungkan pemetaan administratif dengan informasi organisasi pertanian dan membedakan aset yang telah dialokasikan dari aset yang benar-benar digunakan [41, PDF hlm. 8–11]. Cayli membahas budi daya, produk, kesukarelawanan, dan sikap skeptis masyarakat setempat terhadap hasil perampasan [42, hlm. 583–589]. Kedua penelitian menjelaskan praktik dan makna sosial pemanfaatan menurut pihak yang diamati. Data tenaga kerja pada jaringan Libera dibaca menurut organisasi dan satuan yang digunakan, dengan irisan data antarpublikasi yang diperhatikan dalam sintesis.

Ukuran yang berbeda digunakan dalam penelitian kuantitatif. Calamunci dkk. menganalisis 1.044 pemerintah daerah dengan 26.381 observasi. Pada model pertumbuhan harga rumah, koefisien pengalokasian kembali untuk institusi sosial sebesar 0,0045 dengan galat baku 0,0016 [43, hlm. 1012].

Boeri dkk. meneliti harga penawaran di 55 kota, dengan 50.485 observasi pada tabel utama versi accepted manuscript. Pengalokasian kembali aset berkaitan dengan kenaikan harga penawaran pada jarak dekat, dan hubungan tersebut melemah seiring bertambahnya jarak [9, accepted manuscript hlm. 20–25 atau PDF hlm. 22–27]. Analisisnya menggabungkan peruntukan sosial dan institusional dalam satu kategori. Penafsirannya mengikuti data harga penawaran dan penempatan aset yang tidak acak.

Ferrante dkk. menggunakan data 390 pemerintah daerah di Sisilia dalam empat pemilihan regional. Pengalokasian aset untuk tujuan sosial berhubungan dengan konsentrasi suara yang lebih rendah, yang ditafsirkan sebagai persaingan elektoral yang lebih besar [10, preproof hlm. 8–13 atau PDF hlm. 9–14]. Ukuran politik tersebut menjelaskan persaingan elektoral, sedangkan kepercayaan kepada institusi memerlukan pengukuran tersendiri. Adapun penelitian pendukung Fiorillo dkk. menelaah kepercayaan melalui survei individu yang dikaitkan dengan perampasan aset [44]. Perampasan, penetapan penggunaan, dan pembukaan layanan menjadi peristiwa yang dibedakan dalam menafsirkan perubahan tersebut.

3.5 Implikasi bagi pengelolaan aset publik

Temuan tata kelola menempatkan pembagian kewenangan dan penyerahan kewajiban sebagai persoalan pelaksanaan. Kajian keberlanjutan memperlihatkan kebutuhan dana rehabilitasi dan operasi, sedangkan penilaian nilai publik membedakan capaian layanan dari perubahan pada masyarakat. Dari temuan tersebut, penilaian alokasi perlu menghubungkan kondisi properti dengan kemampuan pengelola menjalankan fungsi yang direncanakan.

Dalam penilaian alokasi, kondisi properti perlu diperiksa bersama rencana pengoperasiannya. Penilaian mencakup penguasaan fisik, hak pihak lain, pekerjaan minimum yang diperlukan, perkiraan biaya, dan fungsi yang layak. Rencana pengoperasian perlu menjelaskan layanan, sumber pendanaan untuk kegiatan rutin, kebutuhan pegawai, kewajiban pemeliharaan, serta penanganan gangguan. Pengalaman Bari dan Lecco selama COVID-19 menunjukkan bahwa jenis kegiatan turut menentukan kemungkinan melanjutkan layanan [28, hlm. 85]. Rekomendasi ini bertolak dari pengalaman kasus dan keterangan pengelola. Jangka waktu konsesi serta besaran subsidi memerlukan penilaian tersendiri menurut kondisi proyek.

Pemantauan perlu menghubungkan setiap lokasi layanan dengan identitas hukum properti dan organisasi pengelolanya. Tanggal penetapan peruntukan, penyerahan, rehabilitasi, pembukaan, penghentian sementara, dan pengembalian perlu dicatat secara terpisah. Data biaya, sumber daya, kegiatan, volume layanan, akses penerima manfaat, serta kelangsungan penggunaan membantu menjelaskan apakah hambatan terjadi pada tahap administrasi, konstruksi, atau pengelolaan organisasi. Aset yang tidak aktif juga perlu tetap tercatat agar penilaian mencakup kegiatan yang terhenti, selain contoh yang berhasil.

Bagi Indonesia, pembelajaran dari kajian ini perlu dimulai dengan menilai fungsi aset yang layak, pembagian kewenangan, dan kemampuan pembiayaan menurut pengaturan yang berlaku. Pihak yang menanggung rehabilitasi dan operasi, cara memilih penerima, serta cara memeriksa layanan masih memerlukan jawaban melalui penelitian hukum dan anggaran di Indonesia. Pengalaman Italia memberi pembelajaran untuk merumuskan pertanyaan pengelolaan tersebut, dengan laporan perencanaan di Magelang sebagai titik awal pembahasan kasus Indonesia.

3.6 Perbandingan dan penafsiran temuan

Dalam analisis pembandingan, temuan tentang koordinasi masih didukung survei pengelola, CO-WIN, dan kasus Suvignano. Kendala pembiayaan tetap dijelaskan melalui survei serta penelitian koperasi, sedangkan kasus Phillips tetap menunjukkan kegagalan pemanfaatan. Hubungan di antara 20 kelompok penelitian tetap diperhatikan, terutama pada publikasi Libera yang irisan datanya masih memerlukan penelusuran. Seluruh 22 publikasi membahas Italia. Temuan khusus Magelang, angka proyek Campania dan penghentian Nuvoletta dari Martone, serta intervensi McGinley berada di luar bahan analisis pembandingan ini. Perbandingan dilakukan secara naratif, tanpa penghitungan frekuensi tema atau analisis kuantitatif untuk menyesuaikan penggunaan data berulang.

Analisis pembandingan mencakup publikasi Bucolo, Caggiano dan De Rosa, Picciotto, Corazza dan Zanchettin, Maestri, Mazzanti, Picciotti, L. Palermo, Bonzanni, Troisi, Corica dan Mete, Ferrante, C. Palermo, Calamunci, Bisogno, Boeri, Campioli, Phillips, Tornatora dan Amaro, dua publikasi Giorgi, serta Parrotta. Empat belas publikasi yang disisihkan meliputi Cayli, Germanà dan Antonica, Muti, dua publikasi Tavoletta, dua publikasi Esposito dan Ricci, McGinley, De Boni, Modica, Guzzo, dalla Chiesa, Martone, serta Hakim. Pengelompokan ini digunakan untuk membandingkan isi publikasi. Penilaian mutu mengikuti pembacaan kualitatif yang dijelaskan pada bagian metode.

Studi kasus menjelaskan pembagian peran, proses pengelolaan, dan pengalaman organisasi pada lokasi yang diteliti. Kajian perencanaan menelaah pilihan penggunaan serta kesiapan bangunan, sementara penelitian kuantitatif mengamati harga properti, pertumbuhan harga, dan konsentrasi suara. Perbandingan ini memperlihatkan satuan dan tahap penilaian pemanfaatan yang berbeda. Keterangan penerima layanan diperlukan untuk menilai manfaat yang dirasakan masyarakat, sedangkan pembahasan antarnegara dan kesenjangan penelitian mengikuti sumber yang berhasil dihimpun.

4. KESIMPULAN

Dalam 36 publikasi yang dikaji, penguasaan fisik, kebutuhan rehabilitasi, dan pembagian tanggung jawab masih menjadi persoalan setelah penerima aset ditetapkan. Kerja sama pemerintah daerah, organisasi sosial, perguruan tinggi, dan dunia usaha mendukung rehabilitasi, pelatihan, serta perintisan kegiatan dalam kasus yang dikaji. Pengelolaan karena itu memerlukan kejelasan penanggung jawab sejak aset diserahkan hingga mulai digunakan.

Keberlanjutan kegiatan memerlukan pendanaan setelah rehabilitasi selesai. Biaya pegawai, utilitas, pemeliharaan, dan pelaksanaan layanan perlu diperhitungkan tersendiri dari biaya perbaikan bangunan. Penelitian koperasi juga mencatat kendala memperoleh kredit dan menjangkau pasar. Kemampuan membiayai kegiatan setelah bangunan siap digunakan perlu menjadi pertimbangan dalam keputusan pemanfaatan aset.

Sejumlah properti telah dimanfaatkan untuk menyediakan pekerjaan di koperasi, layanan bagi penyandang disabilitas, program reintegrasi, serta kegiatan pendidikan dan kebudayaan. Penelitian kuantitatif menemukan hubungan pengalokasian kembali dengan harga properti dan persaingan elektoral. Temuan pasar dan politik tersebut dibaca terpisah dari kesejahteraan penerima manfaat. Pengamatan langsung dalam jangka panjang diperlukan untuk menilai besarnya manfaat dan keberlangsungannya.

Penilaian keberhasilan perlu menelusuri penggunaan setiap properti, mulai dari status alokasi dan pembukaan fasilitas hingga kelangsungan layanan, biaya operasi, serta masyarakat yang menerima manfaat. Bagi Indonesia, temuan ini menjadi dasar untuk memeriksa kesiapan aset sekaligus kelayakan rencana pengoperasiannya sebelum pemanfaatan ditetapkan. Penerapannya perlu mempertimbangkan dominasi pengalaman Italia dan penggunaan data yang beririsan. Bentuk kelembagaan dan pembiayaan yang sesuai perlu diuji melalui penelitian di Indonesia.

REFERENSI

- [1] P. Esposito and P. Ricci, "How to turn public (dis)value into new public value? Evidence from Italy," *Public Money & Management*, vol. 35, no. 3, pp. 227–231, 2015, doi: 10.1080/09540962.2015.1027499.
- [2] L. Picciotto, "The social innovation of social cooperatives operating on confiscated mafia properties: Support factors and critical issues," in *Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society*, V. Dermol, A. Trunk, G. Đaković, and M. Smrkolj, Eds. ToKnowPress, 2015, pp. 543–558. [Online]. Available: <https://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-13-0/papers/ML15-110.pdf>
- [3] M. L. Germanà and C. Antonica, "Confiscated property from illegality to common good: Requirements for a necessary resignification," *TECHNE*, no. 28, pp. 139–151, 2024, doi: 10.36253/techne-15934.
- [4] J. M. Bryson, B. C. Crosby, and L. Bloomberg, "Public value governance: Moving beyond traditional public administration and the new public management," *Public Administration Review*, vol. 74, no. 4, pp. 445–456, 2014, doi: 10.1111/puar.12238.
- [5] Ministero dell'Interno, "Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità," n.d. Accessed: Oct. 25, 2026. [Online]. Available: <https://www.interno.gov.it/it/ministero/agenzia-nazionale-lamministrazione-e-destinazione-dei-beni-sequestrati-e-confiscati-alla-criminalita>
- [6] European Parliament and Council of the European Union, "Directive (EU) 2024/1260 of 24 April 2024 on asset recovery and confiscation," *Official Journal of the European Union*, 2024. [Online]. Available: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1260/oj>
- [7] P. Parrotta, M. Stimolo, A. Stringhi, M. Marino, and G. Immordino, "From seizure to social value: Descriptive evidence on the management and reuse of confiscated assets," in *Cultural, Social, and Political Participation in the Internet Era*, R. Cellini, T. Cuccia, F. Drago, M. Romano, and G. Torrisi, Eds. Springer, 2027, pp. 201–214, doi: 10.1007/978-3-032-33072-7_12.
- [8] A. Phillips, "A symbolic defeat? Exploring symbolism and failure in the social reuse of confiscated mafia real estate in Italy," *University of Western Australia Law Review*, vol. 52, no. 1, pp. 101–120, 2024. [Online]. Available: <https://uwe-repository.worktribe.com/output/12106672/a-symbolic-defeat-exploring-symbolism-and-failure-in-the-social-reuse-of-confiscated-mafia-real-estate-in-italy>
- [9] F. Boeri, M. Di Cataldo, and E. Pietrostefani, "Localized effects of confiscated and re-allocated real estate mafia assets," *Journal of Economic Geography*, vol. 24, no. 2, pp. 219–240, 2024, doi: 10.1093/jeg/lbad035.
- [10] L. Ferrante, F. Reito, S. Spagano, and G. Torrisi, "Shall we follow the money? Anti-mafia policies and electoral competition," *Journal of Policy Modeling*, vol. 43, no. 5, pp. 1110–1130, 2021, doi: 10.1016/j.jpolmod.2021.03.010.
- [11] M. J. Page et al., "The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews," *BMJ*, vol. 372, Art. no. n71, 2021, doi: 10.1136/bmj.n71.

- [12] M. L. Rethlefsen et al., “PRISMA-S: An extension to the PRISMA Statement for Reporting Literature Searches in Systematic Reviews,” *Systematic Reviews*, vol. 10, Art. no. 39, 2021, doi: 10.1186/s13643-020-01542-z.
- [13] A. Campioli, O. E. Bellini, C. Bernardini, S. Giorgi, and G. Paganin, “Win-win cooperation for the value enhancement of confiscated assets,” *TECHNE*, no. 27, pp. 237–248, 2024, doi: 10.36253/techne-15135.
- [14] S. Giorgi, A. Parma, C. Bernardini, O. E. Bellini, G. Paganin, and A. Campioli, “Confiscated assets as an opportunity for internship on construction sites aimed at professional qualification and social integration of vulnerable people,” *Social Sciences*, vol. 14, no. 8, Art. no. 491, 2025, doi: 10.3390/socsci14080491.
- [15] S. Giorgi, O. E. Bellini, G. Paganin, and A. Campioli, “On-the-job training for sustainable requalification of buildings,” in *ReShaping the Built Environment through Sustainability and Circularity*, Lecture Notes in Civil Engineering, vol. 909, L. Bragança et al., Eds. Springer, 2026, pp. 1303–1311, doi: 10.1007/978-3-032-35104-3_152.
- [16] C. Tavoletta, “Building on the build. Unfinished architecture and confiscated property as new palinsesto for the contemporary architecture,” *Inżynieria Mineralna*, vol. 1, no. 2, WMCCAU2024, 2024, doi: 10.29227/im-2024-02-78.
- [17] C. Tavoletta, “SHArch: The research,” *Proceedings of ICCAUA*, vol. 8, no. 1, pp. 81–91, 2025, doi: 10.38027/iccaua2025en0170.
- [18] M. Maestri, “I beni immobili confiscati alla criminalità organizzata in Lombardia,” *Rivista di Studi e Ricerche sulla Criminalità Organizzata*, vol. 2, no. 2, pp. 26–53, 2016, doi: 10.13130/cross-7377.
- [19] N. dalla Chiesa, “Il riuso sociale dei beni confiscati. Le criticità del modello lombardo,” *Rivista di Studi e Ricerche sulla Criminalità Organizzata*, vol. 2, no. 2, pp. 15–25, 2016, doi: 10.13130/cross-7376.
- [20] E. Bucolo, “Le rôle des coopératives sociales gérant des biens confisqués à la mafia dans la définition d’une politique publique locale. Un exemple d’interaction entre pouvoirs publics et initiatives de l’économie sociale et solidaire,” *Revue Française de Socio-Économie*, vol. 15, no. 1, pp. 77–95, 2015, doi: 10.3917/rfse.015.0077.
- [21] A. Picciotti, “Towards sustainability: The innovation paths of social enterprise,” *Annals of Public and Cooperative Economics*, vol. 88, no. 2, pp. 233–256, 2017, doi: 10.1111/apce.12168.
- [22] L. Bonzanni, “Rigenerare i beni confiscati al Nord: una sfida multidimensionale nel cuore fragile delle città,” in *DIVERSEcity*, A. Marata and R. Galdini, Eds. Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, 2019, pp. 475–484. [Online]. Available: <https://air.unimi.it/handle/2434/675373>
- [23] G. M. Mazzanti, G. Ecchia, and T. Komatsu, “Innovative partnerships for the utilization of confiscated assets previously owned by mafias,” *Social Enterprise Journal*, vol. 12, no. 1, pp. 21–41, 2016, doi: 10.1108/SEJ-08-2015-0019.
- [24] M. Tornatora and O. Amaro, “Confiscated assets into public heritage,” *TECHNE*, no. 28, pp. 221–233, 2024, doi: 10.36253/techne-15846.
- [25] M. Bisogno, B. Cuadrado-Ballesteros, F. Citro, and G. Vaia, “Transparency in the use of assets confiscated from mafia organizations,” *International Review of Administrative Sciences*, vol. 90, no. 3, pp. 701–720, 2024, doi: 10.1177/00208523231219495.
- [26] F. Modica, “Il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla mafia nel quartiere di Santa Maria di Gesù,” in *L’albero Giusto nella Città Giusta. Forestazione Urbana a Palermo*, L. Macaluso, Ed. Il Poligrafo, 2025, pp. 237–245, doi: 10.82067/9788893873550.
- [27] G. Corica and V. Mete, “The case of the Suvignano estate. A story of mafia, anti-mafia and politics,” *Partecipazione e Conflitto*, vol. 13, no. 3, pp. 1504–1520, 2020, doi: 10.1285/i20356609v13i3p1504.

- [28] C. Palermo, “Réutilisation sociale des biens confisqués au crime organisé à Lecco et Bari (Italie). Quel impact sur la transformation et la valorisation territoriales?” *Geography Notebooks*, vol. 5, no. 2, pp. 73–88, 2022, doi: 10.7358/gn-2022-002-cpal.
- [29] O. Troisi, M. V. Ciasullo, L. Carrubbo, D. Sarno, and M. Grimaldi, “Meta-management for sustainability in territorial ecosystems: The case of Libera’s social reuse of territory,” *Land Use Policy*, vol. 84, pp. 138–153, 2019, doi: 10.1016/j.landusepol.2019.03.007.
- [30] L. M. Guzzo, “Chiesa cattolica e riutilizzo sociale dei beni immobili confiscati alle mafie,” *Ordines*, no. 2, pp. 85–101, 2024. [Online]. Available: https://www.ordines.it/wp-content/uploads/2025/04/5-Guzzo-Uso-dei-beni-confiscati_ordines.pdf
- [31] S. Hakim, S. R. Nurvita, L. A. Azzahra, I. P. Malinda, and C. S. P. Januari, “Kendala pengembalian aset korupsi melalui lelang (Studi kasus H. Lutman bin Rumadi di Magelang),” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, vol. 3, no. 2, pp. 1328–1335, 2025, doi: 10.61104/alz.v3i2.1340.
- [32] R. Nicolae and A. Gușă, Social and Public Reuse of Confiscated and Abandoned Assets in Romania. A CSO-Centred Approach. Association for Cooperation and Sustainable Development, 2026. [Online]. Available: <https://acdd.ro/2026/05/21/reutilizare/>
- [33] A. Carrozzo Magli, G. Righetto, and A. Schiavone, “The quiet payoff: Mafia electoral support and policy inaction,” *CESifo Working Paper*, no. 12330, 2025. [Online]. Available: <https://www.ifo.de/en/cesifo/publications/2025/working-paper/quiet-payoff-mafia-electoral-support-and-policy-inaction>
- [34] P. Esposito and P. Ricci, “Public (dis)value: A case study,” in *Public Value Management, Measurement and Reporting, Studies in Public and Non-Profit Governance*, vol. 3, J. Guthrie, G. Marcon, S. Russo, and F. Farneti, Eds. Emerald, 2014, pp. 291–300, doi: 10.1108/S2051-663020140000003012.
- [35] M. Caggiano and S. P. De Rosa, “Social economy as antidote to criminal economy. How social cooperation is reclaiming commons in the context of Campania’s environmental conflicts,” *Partecipazione e Conflitto*, vol. 8, no. 2, pp. 530–554, 2015, doi: 10.1285/i20356609v8i2p530.
- [36] V. Martone, “Terreni confiscati alla criminalità: Il riuso sociale come leva di governo del territorio bene comune,” in *Enciclopedia Sociologica dei Luoghi*, vol. 6, G. Nuvolati, Ed. Ledizioni, 2022, pp. 309–327. [Online]. Available: https://iris.unito.it/retrieve/a26e99d1-5d78-4b4c-9af6-1fe69bfaeb44/Martone_Terreni-confiscati-criminalit%C3%A0_%28ESL%20Vol.%206%20-%202022%29.pdf
- [37] A. De Boni et al., “The role of social innovation and biodiversity preservation in public and private food procurement in urban areas,” in *Food Procurement and Short Food Value Chains. An Analysis of Case Studies in Public and Private Realms*, D. Fassi, Ed. FrancoAngeli, 2024, pp. 71–85. [Online]. Available: <https://series.francoangeli.it/index.php/oa/catalog/book/1258>
- [38] L. Corazza and A. Zanchettin, “Educazione alla legalità, alla responsabilità sociale e all’inclusione. Una ricerca sui temi dell’antimafia sociale,” *Ricerche di Pedagogia e Didattica*, vol. 11, no. 3, pp. 17–36, 2016, doi: 10.6092/issn.1970-2221/6443.
- [39] L. Palermo, “The ethical side of aesthetic. Street art against the camorra,” *Il Capitale Culturale. Studies on the Value of Cultural Heritage*, no. 18, pp. 203–229, 2018, doi: 10.13138/2039-2362/1839.
- [40] R. McGinley, “Magazzino Brancaccio. Sound, participatory performance and auditory resistance in confiscated properties in Palermo, Sicily,” *Acoustic Ecology Review*, vol. 1, no. 1, 2023, doi: 10.21810/aer.v1i1.5373.
- [41] G. Muti, “The fight against agribusiness crime and the regeneration of agricultural land confiscated from organised crime groups in Italy,” *Belgeo*, no. 4, 2022, doi: 10.4000/belgeo.58516.
- [42] B. Cayli, “Renewing criminalized and hegemonic cultural landscapes,” *Critical Criminology*, vol. 22, pp. 579–593, 2014, doi: 10.1007/s10612-014-9258-z.

- [43] F. M. Calamunci, L. Ferrante, R. Scebba, and G. Torrìsi, “Mafia doesn’t live here anymore: Anti-mafia policies and housing prices,” *Journal of Regional Science*, vol. 63, no. 4, pp. 1001–1025, 2023, doi: 10.1111/jors.12647.
- [44] D. Fiorillo, M. Mosca, and L. Pennacchio, “Institutional trust and the confiscation of real estate assets from organised crime,” *Journal of Institutional Economics*, vol. 22, Art. no. e8, 2026, doi: 10.1017/S1744137426100459.